

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAN AKTIVITAS BELANJA OPERASI TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh

DANIL NOVIANSYAH

01021181621237

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2020

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAN AKTIVITAS BELANJA OPERASI TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh:

Nama : Danil Noviansyah
NIM : 01021181621237
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif.

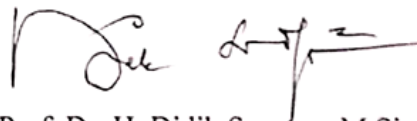
Tanggal Persetujuan

Tanggal:

: 25 Nov 2019

Dosen Pembimbing

Ketua,



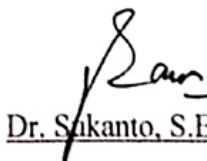
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.

NIP: 196007101987031003

Tanggal:

Anggota,

: 17/12/2019



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.

NIP: 197403252009121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, KEMANDIRIAN KEUANGAN DAN AKTIVITAS BELANJA OPERASI TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Danil Noviansyah
NIM : 01021181621237
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

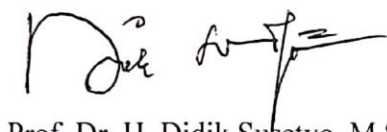
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 9 Januari 2020 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 9 Januari 2020

Ketua

Anggota

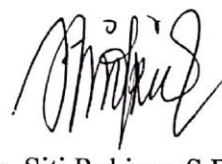
Anggota



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP: 196007101987031003



Dr. Sukanto, SE., M.Si.
NIP: 197403252009121001



Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.
NIP: 196903142014092001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Mukhlis, S.E., M. Si.
NIP: 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Danil Noviansyah
NIM : 01021181621237
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan dan Aktivitas Belanja
Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing:

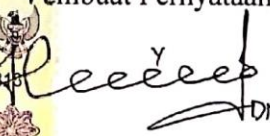
Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
Anggota : Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
Tanggal Ujian : 9 Januari 2020

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan selain
hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan
saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan
gelar kesarjanaan.

Indralaya, 10 Januari 2020

Pembuat Pernyataan,


Danil Noviansyah

NIM. 01021181621237



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan dan Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Skripsi ini menjadi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh antara rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode regresi linier berganda serta membahas tentang pemetaan rasio kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada para akademisi, pemerintah, mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat luas pada umumnya serta para *stakeholder* yang berkepentingan.

Palembang, 10 Januari 2020

Penulis,

Danil Noviansyah

NIM. 01021181621237

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama berjalannya proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada saya selaku hamba-Nya sehingga diberikan kemudahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Ayah Miming Abdullah, Ibu Novita Maharani dan Edo Saputra selaku orang tua dan adik saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa serta selalu rela berkorban sehingga saya bisa mendapat kelancaran dan semangat dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. dan Dr. Sukanto S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si. selaku Dosen Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji saya serta telah membantu memberikan kritik, saran dan masukan untuk skripsi saya.
5. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu dan memberikan semangat untuk saya ketika saya butuh bimbingan akademik selama menjalani proses perkuliahan.
6. Dr. Mukhlis, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan arahan, dukungan dan motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Para dosen di lingkungan Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah bersedia memberikan pemahaman materi saat menjalani proses perkuliahan.

8. Pak Heru, Mbak Narti dan Mbak Sumi selaku Pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu saya mengurus seluruh urusan administrasi dan kepentingan lainnya saat menjalani proses bimbingan dan perkuliahan.
9. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2016 Kampus Indralaya yang selalu memberi warna dalam proses perkuliahan saya.
10. Teman-teman Konsentrasi Ekonomi Keuangan Daerah 2016 yang telah bersama-sama menjalani perkuliahan selama beberapa semester.
11. Teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, M. Iskandar, Ari Sanjaya, Rahayu, Syndi Putri Maisherlly, Pikram Basthonie, Rachmad Wibisono, Muhammad Febrianza Wiranata dan M. Sultan Pasya yang telah memberikan keceriaan, hiburan dan menjadi teman *refreshing* saat saya hilang semangat dalam menjalani perkuliahan dan saat proses menyusun skripsi.
12. Rekan-rekan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan untuk terus semangat menjalani perkuliahan.

Palembang, 10 Januari 2020

Penulis,

Danil Noviansyah

NIM. 01021181621237

ABSTRAK

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan dan Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan

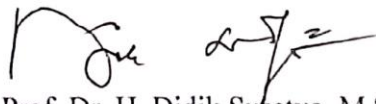
Oleh:

Danil Noviansyah; Didik Susetyo; Sukanto

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data *cross section* yaitu data 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan data *time series* yaitu data tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemetaan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen dan regresi linier berganda data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dengan koefisien sebesar -1,059744 dan signifikan, rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 2,710611 dan signifikan dan rasio aktivitas belanja operasi berpengaruh negatif dengan koefisien sebesar -7,030085 dan signifikan terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

Kata kunci: *Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Aktivitas Belanja Operasi, Alokasi Belanja Modal, Kinerja Keuangan*

Ketua,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Anggota,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
NIP. 197403252009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

The Effect of Fiscal Decentralization, Financial Independence, and Operational Expenditure Activity on the Capital Expenditure Allocation in South Sumatra Province

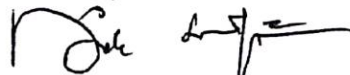
By:

Danil Noviansyah; Didik Susetyo; Sukanto

This study aimed to analyze the effect of ratio of fiscal decentralization, financial independence ratio and ratio of operating expenditure activities on capital expenditure allocation in South Sumatra Province. The data used in this study was panel data consisting of cross section data, data of 17 regencies / cities in South Sumatra Province, and time series data, data from 2014 to 2018. The method used in this study was mapping of ratio of fiscal decentralization, financial independence ratio, and ratio of operating expenditure activities to on capital expenditure allocation using Klassen Typology analysis, and panel data multiple linear regression using Fixed Effect Model. The results of the study showed that the ratio of fiscal decentralization had a negative and significant effect with a coefficient of - 0.059744, the ratio of financial independence had a positive and significant effect with a coefficient of 2.710611 and the ratio of operating expenditure activities had a negative and significant effect with a coefficient of - 7.030085 on capital expenditure allocation of districts / cities in South Sumatra Province in 2014-2018.

Key words: Ratio of Fiscal Decentralization, Financial Independence Ratio, Ratio of Operational Expenditure Activity, Capital Expenditure Allocation, Financial Performance

Chairman,



Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si.
NIP. 196007101987031003

Member,



Dr. Sukanto, S.E., M.Si.
NIP. 197403252009121001

Approved by,

Head of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si.
NIP. 197304062010121001

This is a true and correct translation of the original copied document,
Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University



Bambang A. Loeneto, M.A., Ph.D.
NIP.19550413 198403 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Danil Noviansyah
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 November 1998
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan Purwosari Raya Lorong Purwosari 7 Kelurahan
Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
Alamat Email : danil.noviansyah29@gmail.com
Nomor Telpon : 0896-1325-5705



Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SD Negeri 60 Palembang
SLTP : SMP Negeri 50 Palembang
SLTA : SMA Negeri 18 Palembang
Strata 1 (S1) : Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi:

2016-2017 : Staf Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa BEM
KM FE Unsri Kabinet Solid
2017-2018 : Anggota Departemen HRD KEIMI FE Unsri
2017-2018 : Staf Dinas Advokasi Kampus BEM KM FE Unsri
Kabinet Sinergi
2018-2019 : Anggota Departemen K&I KEIMI FE Unsri
2018-2019 : Wakil Pemimpin Umum LPM Kinerja FE Unsri

Pengalaman Pelatihan :

- 2018 : Pelatihan Jurnalistik Tingkat Dasar (PJTD) LPM Kinerja
FE Unsri
- 2018 : Workshop Jurnanisme Daring LPM Gelora Sriwijaya
- 2019 : Pelatihan Peningkatan Kapasitas *Soft Skill* Calon Alumni
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- 2019 : Pelatihan *Character Building and Competencies To
Work* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- 2019 : Pelatihan *Personal Branding and Effective
Communication* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pengalaman :

- 2017 : Koordintaor Seminar Nasional Pekan Ekonomi Nasional
Sriwijaya (PENAS) Jilid 3 BEM KM FE Unsri Kabinet
Solid
- 2019 : *Liaison Officer* Pekan Ekonomi Nasional Sriwijaya
(PENAS) Jilid 5 BEM KM FE Unsri Kabinet Karya
Kebaikan
- 2019 : Enumerator Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank
Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Periode Juli s.d
Desember 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Praktis	11
1.4.2 Manfaat Akademis	11
 BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	 13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	13
1. Teori Pengeluaran Pemerintah Rostow dan Musgrave.....	13
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Wagner	15
3. Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.....	17
2.2 Definisi dan Konsep	20
2.2.1 Desentralisasi Fiskal.....	20
2.2.2 Anggaran Berbasis Kinerja	22
2.2.3 Kinerja Keuangan Daerah	24
2.2.4 Belanja Modal	27
2.3 Penelitian Terdahulu	29

2.4 Kerangka Pemikiran	31
2.5 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	34
3.2 Rancangan Penelitian.....	34
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Jenis Data	34
3.3.2 Sumber Data	35
3.4 Teknik Analisis Data	35
3.4.1 Tipologi Klassen	35
3.4.2 Rasio Kinerja Keuangan Daerah	38
1. Rasio Desentralisasi Fiskal	38
2. Rasio Kemandirian Keuangan	39
3. Rasio Aktivitas Belanja Operasi	39
4. Rasio Alokasi Belanja Modal	40
3.4.3 Regresi Linier Berganda.....	40
3.4.4 Uji Kesesuaian Model	41
1. <i>Common Effect Model</i>	41
2. <i>Fixed Effect Model</i>	41
3. <i>Random Effect Model</i>	41
4. Uji Chow.....	42
5. Uji Hausman	42
3.4.5 Uji Hipotesis.....	43
1. Uji-F.....	43
2. Uji-t.....	44
3.4.6 Koefisien Determinasi.....	45
3.4.7 Uji Asumsi Klasik	45
1. Uji Normalitas	45
2. Uji Autokorelasi.....	46
2. Uji Heteroskedastisitas	46
3. Uji Multikolinearitas.....	47

3.5 Definisi Operasional Variabel	47
3.5.1 Rasio Desentralisasi Fiskal.....	47
3.5.2 Rasio Kemandirian Keuangan.....	48
3.5.3 Rasio Aktivitas Belanja Operasi	48
3.5.4 Alokasi Belanja Modal.....	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Gambaran Umum.....	50
4.1.1 Geografis dan Wilayah.....	50
4.1.2 Perkembangan Penduduk	52
4.1.3 Perkembangan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	55
4.1.4 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	60
4.1.5 Perkembangan Rasio Aktivitas Belanja OperasiKabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan	65
4.1.6 Perkembangan Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	69
4.2 Hasil Penelitian.....	73
4.2.1 Pemetaan Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	73
1. Pemetaan Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal.....	73
2. Pemetaan Rasio Kemandirian Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal.....	78
3. Pemetaan Rasio Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal	82
4.2.2 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	86
4.2.3 Uji Kesesuaian Model	87
1. Uji Chow	87
2. Uji Hausman	88

4.2.4 Uji Hipotesis.....	93
1. Uji-F.....	93
2. Uji-t.....	94
4.2.5 Koefisien Determinasi.....	95
4.2.6 Uji Asumsi Klasik	96
1. Uji Normalitas	96
2. Uji Autokorelasi.....	97
3. Uji Heteroskedastisitas	97
4. Uji Multikolinearitas.....	98
4.3 Pembahasan	99
4.3.1 Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	99
4.3.2 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	101
4.3.3 Pengaruh Rasio Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	104
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	108
5.1 Simpulan.....	108
5.2 Saran	109
Daftar Pustaka	111
Lampiran	114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal	38
Tabel 3.2	Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian Keuangan.....	39
Tabel 4.1	Daftar Kabupaten/Kota, Ibukota dan Luas Wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	51
Tabel 4.2	Perkembangan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Ribu Jiwa)	53
Tabel 4.3	Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen).....	56
Tabel 4.4	Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen) ...	61
Tabel 4.5	Perkembangan Rasio Aktivitas Belanja Operasi Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen)	66
Tabel 4.6	Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen).....	70
Tabel 4.7	Pemetaan Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen)	74
Tabel 4.8	Pemetaan Rasio Kemandirian Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 (dalam Persen)	78
Tabel 4.9	Pemetaan Rasio Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2017	82
Tabel 4.10	Hasil Estimasi Data Panel Menggunakan Metode <i>Common Effect Model</i> , <i>Fixed Effect Model</i> dan <i>Random Effect Model</i>	86
Tabel 4.11	Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Chow	87
Tabel 4.12	Hasil Pemilihan Model Menggunakan Uji Hausman.....	88
Tabel 4.13	Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	89

Tabel 4.14	Intersep Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	91
Tabel 4.15	Hasil Uji-F Data Panel	93
Tabel 4.16	Hasil Uji-t Data Panel	94
Tabel 4.17	Hasil Uji Autokorelasi Data Panel	97
Tabel 4.18	Hasil Uji Heteroskedastisitas Data Panel	97
Tabel 4.19	Hasil Uji Multikolinearitas Data Panel	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen)	4
Gambar 1.2	Rata-Rata Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen)	7
Gambar 1.3	Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rata-Rata Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen).....	8
Gambar 2.1	Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	16
Gambar 2.2	Teori Peacock dan Wiseman	18
Gambar 2.3	Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	20
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran	33
Gambar 3.1	Peta Klasifikasi Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Berdasarkan Metode Tipologi Klassen.....	36
Gambar 4.1	Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	50
Gambar 4.2	Perbandingan Antara Daerah dengan Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal Tertinggi dan Terendah	57
Gambar 4.3	Perbandingan Antara Daerah dengan Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Tertinggi dan Terendah	62
Gambar 4.4	Perbandingan Antara Daerah dengan Rata-Rata Rasio Aktivitas Belanja Operasi Tertinggi dan Terendah	67
Gambar 4.5	Perbandingan Antara Daerah dengan Rata-Rata Alokasi Belanja Modal Tertinggi dan Terendah.....	71
Gambar 4.6	Pemetaan Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	75
Gambar 4.7	Pemetaan Rasio Kemandirian Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	79
Gambar 4.8	Pemetaan Rasio Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	83
Gambar 4.9	Hasil Uji Normalitas Data Panel	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i>	114
Lampiran 2	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	115
Lampiran 3	Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i>	116
Lampiran 4	Hasil Uji Chow.....	117
Lampiran 5	Hasil Uji Hausman	118
Lampiran 6	Hasil Representasi Intersep Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	119
Lampiran 7	Hasil Uji Normalitas.....	121
Lampiran 8	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	122
Lampiran 9	Hasil Uji Multikolinearitas	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pelaksanaan pemerintah daerah, baik pada daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota mulai memasuki era yang baru dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisi tentang Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi menjadi landasan umum pelaksanaan sistem otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia. Dasar hukum tersebut dalam pelaksanaannya telah mengalami penyesuaian sehingga menyebabkan adanya perubahan pada pola pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan tersebut dilakukan agar kebijakan yang ditetapkan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, otonomi daerah menjadi wewenang pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Melalui kebijakan tersebut menjadikan pemerintah daerah memiliki peluang dan tantangan yang lebih besar untuk mengelola seluruh sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Suwandi & Tahar, 2015).

Sejalan dengan perkembangan dasar hukum pelaksanaan sistem desentralisasi atau otonomi daerah, tentunya menimbulkan pengaruh pada perubahan proses pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat dilakukan di segala bidang, terutama di bidang sarana dan prasarana bagi publik (*public services*) yang hubungannya sangat dekat dengan aktivitas masyarakat. Dalam perspektif teori, desentralisasi atau otonomi daerah akan mendekatkan hubungan antara pemerintah kepada masyarakat. Diterapkannya sistem pemerintahan yang terdesentralisasi diharapkan akan menciptakan kondisi yang efisien dalam perekonomian (Hidayat, 2013).

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada pemerintahan daerah pada dasarnya dapat dilakukan secara mandiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat dari segala sisi. Mulai dari sisi perencanaan, pembangunan dan pembiayaan dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. Oleh sebab itu, kebijakan dan upaya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah harus dilakukan dengan secara kreatif dan inovatif. Upaya yang dilakukan tersebut bergantung pada bentuk kebijakan pemerintah yang diambil dan diterapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilitas sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara eksekutif dan berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif (Hidayat, *et al.*, 2007).

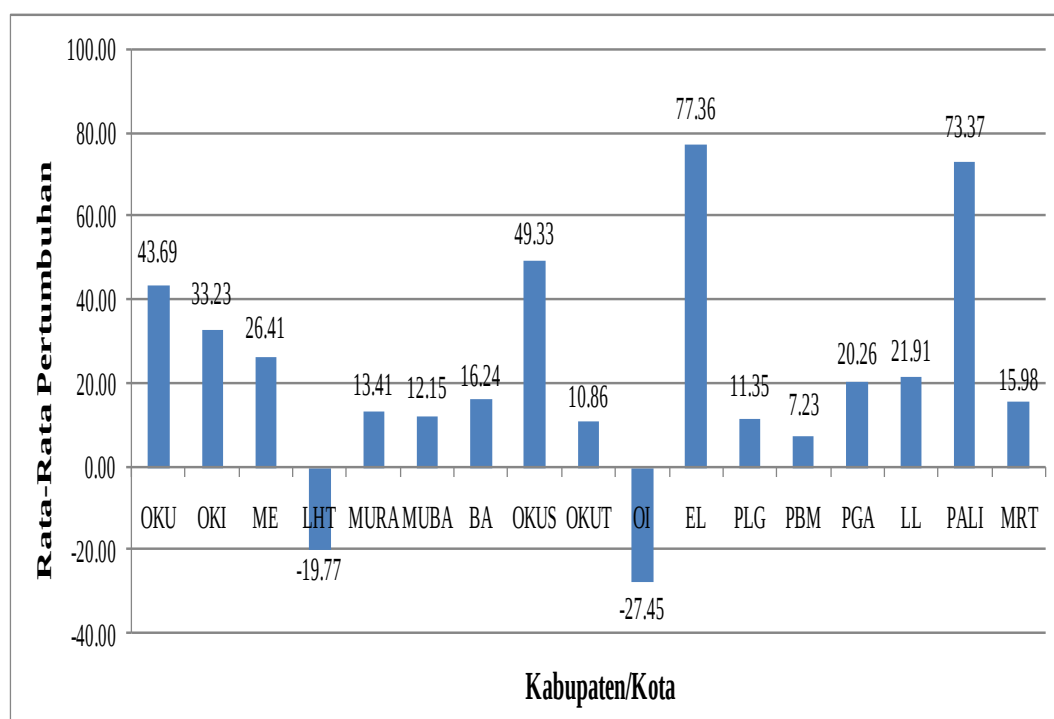
Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian daerahnya dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut didukung oleh wewenang pemerintah daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam menggali sumber pendapatan dan fiskal lainnya, termasuk dalam melaksanakan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah (Pratiwi, 2014).

Kondisi daerah sebelum dan sesudah diterapkannya sistem otonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama membahas tentang pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama berasal dari kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu aspek kedua membahas tentang manajemen pengeluaran daerah dimana pengelolaan keuangan daerah harus lebih transparan dan akuntabel yang menuntut agar pemerintah daerah lebih efektif dan efisien dalam hal pengeluaran daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien atau memenuhi prinsip *value for money* serta berorientasi baik pada rencana yang telah ditetapkan serta tujuan yang telah dijadikan sebagai sasaran akan memberikan pengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Hal tersebut akan menjadi penilaian dalam mengelola keuangan daerah.

Keuangan daerah yang dikelola dengan baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Salah satu cara untuk mengukur tingkat

kemampuan daerah dapat dilihat dari besarnya penerimaan, terutama besarnya nilai pendapatan daerah khususnya yang diterima dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali sumber-sumber keuangan daerah sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik menandakan daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Sularso & Restianto, 2011).



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah.

Gambar 1.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan rata-rata pertumbuhan realisasi PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama 2016-2018 secara umum terlihat nilai rata-rata pertumbuhan PAD yang bervariasi. Kabupaten Empat Lawang memiliki nilai pertumbuhan rata-rata tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 77,36 persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017 dan 2018 yaitu melakukan pengoptimalan penagihan kepada masyarakat, baik dalam penagihan pajak, retribusi maupun sumber-sumber PAD lainnya. Sementara itu, Kabupaten Ogan Ilir menjadi kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan PAD terendah, yaitu sebesar -27,45 persen. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2017 dan penurunan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2018 sehingga menyebabkan penerimaan PAD pada tahun 2017-2018 Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan.

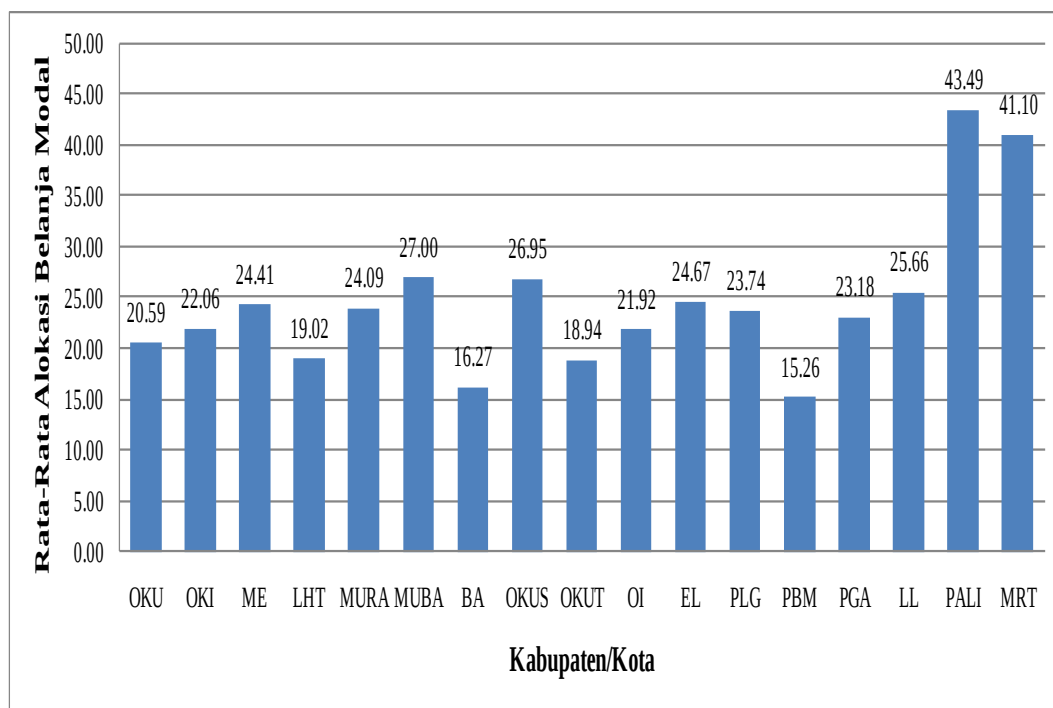
Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan prioritas pembangunan di daerah yang bersangkutan. Hal tersebut dilakukan karena sumber keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah akan menghadapi permasalahan pengalokasian, terutama pengalokasian pada sumber-sumber daya. Melalui sumber daya yang jumlahnya terbatas, pemerintah daerah diharuskan mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dari daerah yang bersangkutan untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat, 2013).

Menurut Todaro (2003), terdapat salah satu dari tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal dalam kemajuan suatu daerah menjadi tolok ukur pertumbuhan ekonomi daerah yang salah satunya dapat ditunjukkan oleh besarnya nilai investasi daerah yang dihasilkan melalui belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Suatu daerah yang ingin meningkatkan belanja modal daerahnya, maka hal tersebut harus diikuti dengan kondisi kemampuan baik dari sisi keuangan daerah maupun sumber daya daerah yang memadai.

Indikator yang menunjukkan nilai investasi daerah adalah dengan melihat berapa tingginya rasio alokasi belanja modal pada APBD. Semakin tinggi rasio alokasi pada belanja modal, maka anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan untuk belanja modal daerah semakin besar. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh kondisi baik atau tidaknya kinerja keuangan pada pemerintah daerah tersebut (Sularso & Restianto 2011).

Berdasarkan amanat dari Direktorat Jenderal Anggaran, proporsi belanja modal pada pemerintah daerah yang ideal adalah lebih dari atau sama dengan 30 persen dari total belanja daerah pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan Gambar 1.2, rata-rata pertumbuhan rasio alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2018 terlihat fluktuatif dengan nilai yang bervariasi. Rasio alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018 yang tertinggi ditempati oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sebesar 43,49 persen yang menunjukkan 43,49 persen total dana belanja daerah Kabupaten PALI dialokasikan untuk memenuhi

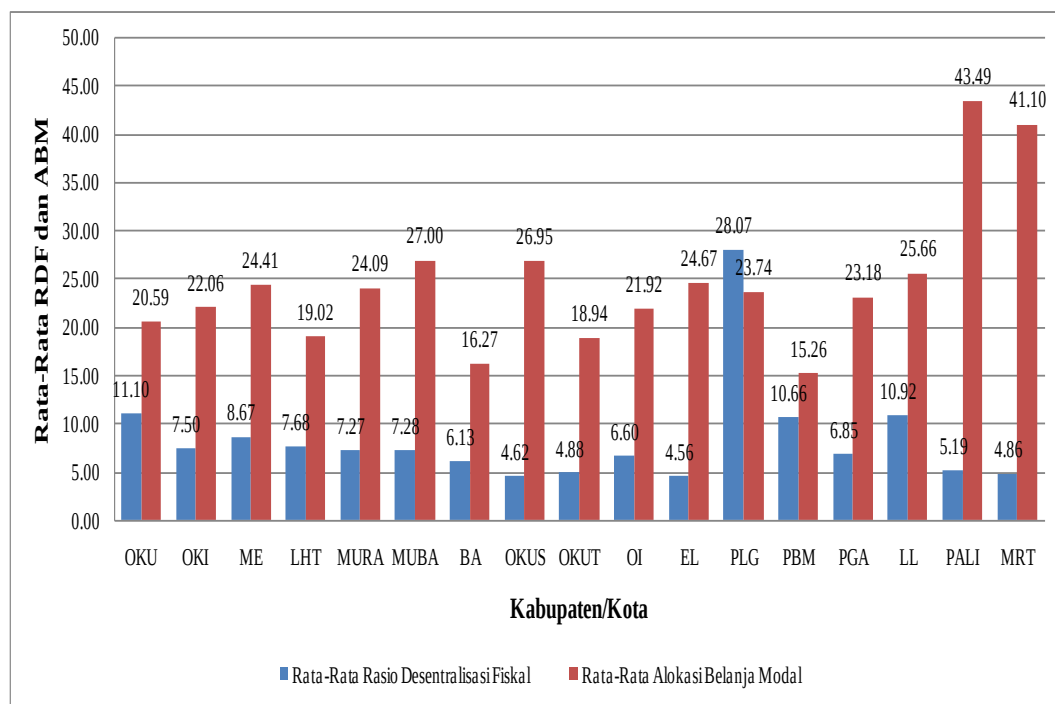
pengalokasian belanja modal di kabupaten tersebut. Hal tersebut didukung karena pembangunan berbagai infrastruktur di Kabupaten PALI yang sedang berkembang, mengingat Kabupaten PALI merupakan salah satu kabupaten yang baru saja berdiri selain Kabupaten Musi Rawas Utara. Sementara itu, daerah dengan rasio alokasi belanja modal terkecil adalah Kota Prabumulih yaitu sebesar 15,26 persen. Pengalokasian dana belanja modal Kota Prabumulih belum bisa dikatakan baik karena belum memenuhi proporsi alokasi belanja daerah untuk belanja modal yang baik. Hal itu juga disebabkan oleh sedikitnya kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Prabumulih.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah.

Gambar 1.2 Rata-Rata Alokasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen)

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa rasio alokasi belanja modal terhadap belanja daerah dapat mencerminkan seberapa besar porsi dana belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi rasionya, pengaruhnya yang diberikan juga semakin besar pada pertumbuhan ekonomi daerah, begitupun sebaliknya (Hidayat, 2013).



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2016-2018, data diolah.

Gambar 1.3 Rata-Rata Rasio Desentralisasi Fiskal dan Rata-Rata Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018 (dalam Persen)

Gambar 1.3 memperlihatkan kondisi rata-rata rasio desentralisasi fiskal dan rata-rata alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2016-2018. Kondisi rata-rata rasio desentralisasi fiskal pada Gambar

1.3 secara umum berada pada angka di bawah 10 persen. Berdasarkan kriteria rasio desentralisasi fiskal, apabila rasio tersebut nilainya di bawah 10 persen maka dapat dikatakan daerah tersebut masuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Hal tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan belum secara maksimal dalam melaksanakan otonomi daerah dan juga belum maksimal dalam menggali sumber penerimaan daerahnya dengan baik. Hal tersebut berdampak pada besarnya alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagian besar daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada Gambar 1.3 memperlihatkan nilai alokasi belanja modal masih didominasi angka di bawah 30 persen atau belum memenuhi proporsi belanja modal yang ideal dari total belanja daerah. Besarnya kecilnya angka rasio desentralisasi fiskal sebagai indikator dari kinerja keuangan daerah tersebut memiliki pengaruh terhadap besarnya kecilnya pengalokasian penerimaan daerah untuk belanja modal.

Melihat fenomena tersebut, kinerja keuangan daerah menjadi bagian yang penting dalam proses penyediaan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah baik di daerah tingkat provinsi maupun daerah tingkat kabupaten/kota itu sendiri melalui pengalokasian penerimaan daerah untuk belanja modal yang telah dianggarkan setiap tahunnya dan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing daerah di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk melihat “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan dan Aktivitas Belanja Operasi terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan.”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemetaan kinerja keuangan daerah yang dilihat melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis pemetaan kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

2. Menganalisis pengaruh rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio aktivitas belanja operasi terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, terdapat manfaat yang akan diperoleh oleh pembaca secara ilmiah melalui penelitian ini. Manfaat tersebut antara lain:

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Dapat digunakan oleh pemerintah daerah, pejabat daerah yang berwenang dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai salah satu referensi untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Sebagai sumber rujukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah yang saat ini agar dapat lebih baik di periode yang selanjutnya.
- c. Sebagai sumber rujukan dalam hal meningkatkan alokasi belanja modal serta melakukan pengelolaan anggaran yang baik, efektif dan efisien di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2. Manfaat Akademis

Manfaat praktis yang dapat digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Dapat dipergunakan oleh para akademisi, baik dosen maupun mahasiswa untuk memahami dan mendalami permasalahan di bidang ilmu ekonomi khususnya

permasalahan tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan alokasi belanja modal di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

- b. Dapat menjadi informasi, wacana dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian mengenai obyek yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, I. Ketut & Setiawina, Nyoman Djinar. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20 (2) Agustus 2015, 104–112.
- Asngari, Imam. (2013). *Modul Pelatihan: Econometrics*. Palembang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Unsri.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2019*. Palembang: Badan Pusat Statistik.
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. *Jurnal GaneC Swara Edisi Khusus*, 4 (3) Desember 2010, 75–86.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2015). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018*. Jakarta.
- Gujarati, Damodar N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hafidh, Aula Ahmad. (2013). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18 (2) Oktober 2013, 109–120.
- Hanafi, Imam & Nugroho, T. (2009). *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Hidayat, Mochamad Fajar. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, 1 (1), 1–19.
- Hidayat, Paidi, Pratomo, Wahyu Ario & Harjito, D. Agus. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12 (3) Desember 2007, 213–222.
- Jayanti, Suharni. (2017). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Repositori Institusi USU. Universitas Sumatera Utara.

- Mangkoesoebroto, Guritno. (2010). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A. (1969). *Fiscal Systems*. New Haven and London: Yale University Press.
- Novianto, Riko & Hanafiah, Rafiudin. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4 (1) Januari-Juni 2015, 1–22.
- Nurdiawaty, Diah & Zaman, Badruz. (2016). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 7 (1) Januari 2016, 31–40.
- Peacock, Alan T. & Wiseman, Jack. (1961). *The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom*. London: Oxford University Press.
- Praza, Eko Indra. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4 (1) Juli-September 2016, 25–36.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jaka.
- Rohima, Siti. (2017). The Financial Performance of Regencies/Cities in South Sumatera Province (2006-2015 Time Period). *Journal of AFEBI Economic and Finance Review (AEFR)*, 02 (01) June 2017, 43–63.
- Rostow, W. W. (1959). The Stage of Economic Growth. *The Economic History Review*, Vol. 12, N, 1–16.
- Sukarni, Ni Wayan & Budiasih, IGA Nyoman. (2016). Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5 (3) 2016, 545–572.
- Sularso, Havid & Restianto, Yanuar E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2) Agustus 2011, 109–124.

- Susetyo, Didik, Zunaidah, Rohima, Siti, Yulianita, Anna, Adam, Mohammad & Valeriani, Devi. (2017). Expenditure Analysis of Local Government and Regional Economic Development District/City of Ten Province in Sumatra Island Indonesia. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15 (3) 2017., Hal. 17-42.
- Suwandi, Kuzni Adi, & Tahar, Afrizal. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D. I. Yogyakarta). *Jurnal InFestasi*, 11 (2) Desember 2015, 118–136.
- Tamawiwiy, Julius, Sondakh, Jullie J. & Warongan, Jessy D. L. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Ekonomi*, 1 (1) 2016, 103–124.
- Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Zelmiyanti, Riri (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK*, 7 (1) Februari 2016, 11–21.
- Zulkarnain, M. (2017). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Alokasi Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh*. Repositori Institusi USU. Universitas Sumatera Utara.